

**Memahami Persoalan Perbatasan Melalui Sudut Pandang
Pendekatan Studi Keamanan *Copenhagen School* dan *Aberystwyth/Welsh School***

Rizal A. Hidayat
Universitas Al-Azhar Indonesia
rizalhidayat369@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini ingin menggambarkan persoalan perbatasan yang dikonstruksi melalui pendekatan studi keamanan, dimana saat ini mengalami pergeseran pemahaman ontologis akan makna konsep keamanan. Muara persoalannya sebenarnya hanya satu, yaitu bagaimana memahami persoalan perbatasan melalui sudut pandang pendekatan studi keamanan. Artinya, persoalan hakiki perbatasan adalah persoalan terwujudnya keamanan militer dan nirmiliter perbatasan, yang menyimpan berbagai aspek kebutuhan kehidupan dari para aktor yang berkepentingan dengan keamanan perbatasan tersebut. Melalui pendekatan studi keamanan *Copenhagen School* dan *Aberystwyth School*, pada akhirnya peran negara tetap dibutuhkan dalam menyelenggarakan aspek-aspek kehidupan masyarakat di perbatasan dalam rangka menjamin terwujudnya kebebasan masyarakat dari ancaman keamanan yang berdimensi internal maupun eksternal terhadap kedaulatan wilayah, harga diri, integritas maupun tata kelola manajemen nasional.

Kata Kunci: Keamanan Perbatasan, Keamanan Militer, Keamanan Nirmiliter, *Copenhagen School*, *Aberystwyth School*

Pendahuluan

Memahami dinamika persoalan perbatasan memberikan banyak pengertian akan makna dan hakekat manajemen pengelolaan perbatasan yang sebenarnya. Sebagian besar persoalan tersebut mengandung muara makna akan kedaulatan wilayah suatu negara-bangsa. Yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai upaya suatu negara dalam mempertahankan aspek keutuhan wilayahnya yang tersebar ke dalam berbagai batasan teritorialnya yang membentang sejauh negara tersebut berbatasan dengan negara-negara tetangganya. Batasan teritorial bisa berarti sepanjang daratan, laut dan wilayah udara di atas teritorial daratan dan

lautan negara yang bersangkutan tersebut. Namun yang paling penting adalah upaya mempertahankan, sekaligus berusaha untuk mengamankan keutuhan wilayah perbatasan menjadi persoalan berharga yang merupakan bagian dari kepentingan nasional. Yang kemudian termanifestasikan pada berbagai masalah yang mengancam keutuhan wilayah yang menjadi kedaulatan perbatasan negara tersebut.

Sebenarnya makna dan hakekat persoalan perbatasan memiliki dua muara kajian keamanan yang berangkat dari dua sudut pandang obyek referensi keamanan. Persoalan yang pertama mencakup sekuritisasi sektoral ancaman negara. Yang dimaksud sekuritisasi sektoral ancaman negara adalah ancaman keamanan terhadap eksistensi faktor-faktor yang diberdayakan atau menjadi tanggung jawab negara sebagai *tangible factors* meliputi geografi, demografi dan kekayaan alam. Apabila ketiga faktor tersebut berhasil dimiliki oleh suatu negara dari wilayah lain, atau setidaknya menjadi sengketa bagi negara-negara yang merasa mengklaim kepemilikan atas ketiga faktor *tangible threats* tersebut berdasarkan telaah historis maupun yuridis internasional dari pihak-pihak yang terkait dengan sengketa yang dimaksud. Oleh karena itu, maka besar kemungkinan akan memunculkan konflik. Lazim dikenal sebagai *border dispute*. Contoh konflik yang paling hangat dan aktual adalah konflik Laut Cina Selatan (Spratley-Paracel), Laut Cina Timur (Senkaku-Diaoyu), Blok Ambalat dan sebagainya. Keterlibatan kekuatan militer untuk mendukung potensi terbuka konflik *inter-state* menjadi begitu nyata dalam rangka klaim kepemilikan faktor geografi, demografi dan kekayaan alam. Hal ini merupakan konsekwensi logis dikarenakan suatu negara dapat disebut sebagai negara berdaulat jika kepemilikan ketiganya menjadi bagian dari kepentingan nasional yang harus diperjuangkan dan dipertahankan oleh negara yang bersangkutan.

Persoalan keamanan perbatasan yang kedua adalah eksistensi kehidupan ekosistem di lingkungan seputar perbatasan tersebut. Yaitu persoalan sekuritisasi eksistensi kehidupan manusia yang sebagai *stakeholder* perbatasan, dan bermakna lebih dari sekedar manusia sebagai obyek referen keamanan. Manusia yang kehidupan sehari-harinya tergantung dari sumber daya alam yang terdapat di sekitar perbatasan. Apabila hal tersebut tidak diperhatikan, kemungkinan kemunculan konflik separatisme, iredentisme dan bahkan konflik *intra-state* bisa terjadi. Dan hal tersebut menjadi faktor ancaman keamanan perbatasan yang dilakukan oleh aktor manusia yang justru menjadi subyek ancaman keamanan perbatasan itu sendiri. Jadi secara garis besar persoalan kedua keamanan perbatasan sebenarnya merefleksikan persoalan terwujudnya keamanan struktural yang bebas dari ancaman militer maupun nirmiliter. Berangkat dari titik tolak kedua muara persoalan keamanan perbatasan di

atas, maka persoalan pertama merelevansikan pendekatan studi keamanan *Copenhagen School*. Dan yang kedua, dapat dianalisis melalui relevansinya dengan pendekatan studi keamanan *Aberystwyth/Welsh School*.

Pembahasan

Pendekatan Studi Keamanan *Copenhagen School*

Pendekatan studi keamanan *Copenhagen School* merupakan pendekatan studi keamanan yang merespon pendekatan keamanan yang pada masa perang dingin lebih menitikberatkan pada ancaman militer. Pasca perang dingin justru ancaman militer bisa berangkat dari persoalan-persoalan ancaman yang bersifat kehidupan nirmiliter seperti: lingkungan, kesehatan, manusia/individu, politik, sosial budaya maupun ekonomi. Dengan demikian realitas ancaman terhadap keamanan perbatasan juga terkait pada sektor-sektor kehidupan tersebut di atas yang berpotensi menjadi ancaman militer. Oleh karena itu, ancaman militer yang dalam pemikiran perang dingin berpotensi menjadi konflik/perang simetris *interstate* karena dipicu oleh isu perlombaan adu kecanggihan alat utama sistem persenjataan (alutsista), dalam hal ini mengalami pergeseran isu strategis. Dan lebih mengarah pada analisis faktor-faktor nirmiliter seperti tersebut di atas yang menggerakkan isu keamanan militer. Hal tersebut lazim disebut sebagai perang asimetris. Jadi, persoalan keamanan perbatasan notabene mampu menjadikan dirinya sebagai pemicu kemunculan perang asimetris karena perebutan kepentingan kepemilikan atau kekacauan kehidupan keamanan struktural di seputar kehidupan wilayah perbatasan tersebut. Bagi Pendekatan studi keamanan *Copenhagen School*, fenomena tersebut merupakan pengembangan lebih luas (*wider*) konsep keamanan saat ini dalam hubungannya dengan pergeseran analisis sektoral keamanan (*sectoral analysis security*) dan konsep sekuritisasi (*securitization*).

Bisa dikatakan bahwa potensi ancaman keamanan perbatasan yang dipicu oleh sektor-sektor keamanan di luar wilayah ancaman militer sebagai pemicu perang asimetris di atas dapat dirangkum dari beberapa unsur kepentingan yang menyangkut dimensi statis dan dinamis keamanan perbatasan yang menjadi basis *sectoral analysis security*. Dimensi statis dapat digambarkan melalui faktor geografi, demografi dan kekayaan alam. Sedangkan melalui dimensi dinamis terdapat faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan-keamanan. Sekalipun demikian sebaliknya, kedua dimensi nirmiliter tersebut mampu menghadirkan ancaman keamanan perbatasan yang mempengaruhi pertahanan-

keamanan negara, berupa pertahanan non-militer sebagai politik pertahanan negara, sebagaimana yang dapat dicontohkan dalam konteks keamanan perbatasan di Indonesia.

Dalam relevansinya dengan pemikiran Anggoro (2009:59), pertahanan non-militer (*non-military defense*) merupakan istilah yang belum lama diintrodusir di Indonesia. Namun sesungguhnya konsep itu telah lama dikenal. Konsep itu bahkan kerap kali dilahirkan dari paradigma non-kekerasan (*non-violent struggle*) yang menganggap alat kekerasan bukan merupakan alat sah dalam pergaulan internasional, dan bahwa represi merupakan instrumen yang harus dihindari dalam penataan politik domestik. Selanjutnya, konsep itu juga sering dianggap merupakan bagian dari pertahanan total (*total defense*) atau bahkan yang di Indonesia kerap dimengerti sebagai sistem pertahanan (dan keamanan) rakyat semesta (*sishankamrata*).

Melalui pendeskripsian esensi pendekatan studi keamanan *Copenhagen School* di atas, maka pengembangan lebih luas (*wider*) dari konsep keamanan oleh Buzan, Waever dan De Wilde (1998:21) terkait dengan analisis sektoral keamanan (*sectoral analysis security*) dan konsep sekuritisasi (*concept of securitization*). Namun keduanya tetap menitikberatkan pada negara sebagai penanggung jawab ancaman keamanan militer dan nirmiliter. Hal tersebut tercermin dari pernyataan mendasar ketiganya dalam rangka menjawab persoalan ontologis seputar: apakah keamanan itu? Jawaban atas pertanyaan apakah keamanan itu dalam hal ini dimanifestasikan ke dalam bentuk ancaman eksistensial (*existential threat*) dan tindakan darurat (*emergency measures*). Kedua entitas konsep keamanan yang diajukan oleh Buzan, Waever dan De Wilde sebagai karakteristik *Copenhagen School* yang terdiri atas keamanan militer, keamanan politik, keamanan ekonomi, keamanan lingkungan. Sekuritisasi diartikan lebih dari sekedar politisasi keamanan (1998:22).

Menurut Buzan, Waever dan De Wilde (1998:23-24) secara teori, setiap isu yang berkembang di ruang masyarakat/publik dapat ditempatkan dalam spektrum nonpolitisasi (artinya tidak terkait dengan keamanan negara dan dengan demikian tidak memerlukan debat publik dan kebijakan publik) menjadi terpolitisasi (menjadi suatu isu keamanan yang dapat memasuki ruang debat publik yang membutuhkan keputusan negara/pemerintah dan pengalokasian sumber daya pemerintah dalam menyelesaikan isu keamanan tersebut, atau bisa juga meskipun sangat jarang, membutuhkan keterlibatan sekelompok individu yang mewakili negara/pemerintah) sehingga memunculkan isu sekuriti (yang diartikan sebagai isu keamanan tersebut mewakili suatu ancaman eksistensial, membutuhkan tindakan darurat

dan menjustifikasikan segala tindakan dan keputusan di luar jangkauan prosedur normal dan proses politik formal).

Terkait persoalan keamanan perbatasan, maka esensi *Copenhagen School* adalah bahwa sebenarnya keamanan perbatasan adalah bagian dari obyek referen keamanan, dan sekaligus merupakan subyek politik yang bertanggung jawab terhadap keutuhan wilayah/lingkungan seputar perbatasan tersebut. Relevansi dasar dari keamanan perbatasan tersebut terhadap negara sebagai subyek dan obyek referensi keamanan perbatasan dikarenakan bahwa, pelibatan negara sebagai unit analisis pendekatan studi keamanan *Copenhagen School* mengandung tiga karakteristik utama. Ketiga karakteristik utama yang dimaksud dalam hal ini meliputi *referent object*, *securitizing actor* dan *functional actor* (Ibid:35):

1) *Referent Object*: keamanan perbatasan merupakan obyek yang terancam dan negara sebagai penanggung jawab utama keamanan perbatasan memiliki legitimasi untuk tetap mempertahankan keutuhan wilayah perbatasan agar tetap *survive* sebagai bagian dari kedaulatan negara. Hal ini mengingatkan kita pada inti pemikiran *Copenhagen School* bahwa dalam sektor keamanan: “*The referent object for security has traditionally been the state and, in a more hidden way, the nation. For a state, survival is about sovereignty, and for a nation it is about identity.*”

2) *Securitizing Actors*: negara merupakan aktor utama yang mendeklarasikan ancaman keamanan perbatasan. Hal ini dikarenakan karena pada hakekatnya, aktor negara mampu mengkonstruksi berbagai macam bentuk ancaman bagi keamanan negara. (*In principle, securitizing actors can attempt to construct anything as a referent object*)

3) *Functional Actors*: Ancaman keamanan perbatasan dipengaruhi oleh setiap aktor (baik negara maupun non negara) yang memiliki kapabilitas mempengaruhi dinamika eskalasi level ancaman keamanan perbatasan. Yang harus diingat adalah aktor tersebut bukan merupakan obyek referen keamanan. Yang dimaksud negara sebagai obyek referen keamanan itu sendiri adalah sebagai *stakeholder actor* yang memiliki wilayah perbatasan yang dimaksud.

Pendekatan Studi Keamanan *Aberystwyth/Welsh School*

Pendekatan studi keamanan *Aberystwyth/Welsh School* sangat berbeda dalam melihat persoalan isu keamanan secara garis besar. Jika *Copenhagen School* memandang negara

sebagai subyek/aktor penanggung jawab sekaligus menempatkan posisinya dalam obyek referen keamanan, maka *Aberystwyth/Welsh* lebih melihat negara sebagai subyek politik yang menyebabkan terjadinya ancaman keamanan. Negara sebagai penyebab utama ancaman keamanan sektor-sektor nirmiliter menjadi kunci dari terjadinya kekacauan struktural kehidupan lingkungan di wilayah keamanan negara. Dengan demikian, maka dampak terbesar dari kekacauan tersebut dirasakan oleh manusia/masyarakat/penduduk di sekitar wilayah yang dimaksud.

Pada intinya, kelompok *Welsh (Aberystwyth School)* dipengaruhi oleh dominasi aliran pemikiran dari para teorikus beraliran pemikiran kritis (*Critical Theory*). *Welsh School* dipelopori oleh Ken Booth dan memiliki dua akar pemikiran, yaitu *radical interpretation* dan *critical theory*. Pemikiran Horkheimer, Adorno, ataupun Habermas, yang lebih dikenal dengan *Frankfurt School*, Gramsci, Marx dan para pemikir *critical theory* dalam kajian hubungan internasional sangat kuat mempengaruhi *Welsh School*. Fokus utama kelompok ini adalah apa yang menjadi makna kata “keamanan”. Mereka melihat keamanan tidak dalam ruang yang kosong. Makna keamanan tidak dapat dilepaskan dari agenda-agenda sosial yang dibawa oleh siapapun yang memberikan makna terhadap kata “keamanan” dan praktik politik yang tentu juga dipengaruhi oleh peta kekuatan yang ada (Wardoyo, 2015:91).

Dengan demikian, mengacu kepada fokus utama *Aberystwyth/Welsh School* dalam memaknai konsep keamanan yang berangkat dari pengaruh teori kritis. Seperti yang sudah terdeskripsikan di atas, maka terdapat tiga entitas persoalan ontologis yang diajukan oleh Booth tentang konsep keamanan dari sudut pandang teori kritis yang dijelaskan dalam Murtimer (2013:76) yaitu:

a) *What is real?* (Apakah yang nyata itu?). Fokus teori kritis adalah menyediakan sebuah jalan akan pemahaman ontologis dunia nyata sebagai sebuah praktek dari berbagai fakta sosial.

b) *What is knowledge?* (Apakah pengetahuan itu?). Teori kritis menyediakan makna pemikiran mengenai apakah pengetahuan itu, atau tentang epistemologi kehidupan sosial. Dengan demikian hal ini membawa langsung perhatian kita terhadap segala kepentingan utama akan setiap klaim utama pengetahuan, dan memandu kita untuk mempertanyakan kepemilikan siapa dari bentuk-bentuk pengetahuan tersebut yang secara khusus dipergunakan untuk apa, dan apakah kepemilikan akan segala bentuk pengetahuan tersebut membantu berbagai kepentingan yang ada dari setiap individu dari masing-masing

kelompok yang ada.

c) *What is to be done?* (Apa yang harus dilakukan?). Teori kritis merupakan teori praksis, sebuah teori yang memandu kepada sebuah proses keterlibatan politis yang didesain dalam rangka mentransformasikan dunia.

Ketiga pernyataan ontologis yang diajukan oleh Booth dalam pengaruh *Critical Theory* di atas, yaitu: *What is real?*, *what is knowledge?* dan *what is to be done?* diterminologikan ke dalam tiga buah pernyataan ontologis dari karakteristik *Welsh School* yaitu: (1). *Deepening Security (What is real?)*; (2). *Broadening Security (What is knowledge?)*; dan (3). *Extending Security (What is to be done?)*. Ketiganya di atas merupakan sebuah *critical statement* dari *Welsh School* terhadap pendekatan keamanan tradisional yang mengabstraksikan isu-isu militer dalam konteks yang lebih luas dengan membuat serangkaian asumsi implisit tentang konteks isu-isu militer tersebut sebagai premis pendekatan realisme (Jones, 1999:102).

Deepening security dimaksudkan sebagai sebuah konseptualisasi keamanan yang tidak hanya menyediakan arti penting dari kritik terhadap studi keamanan tradisional, namun juga merupakan rekonstruksi pendekatan alternatif, lebih kritis lagi adalah basis orientasi konsep keamanan tersebut. Pemikiran mendasar yang membawahi *deepening security* tersebut jauh melampaui dua perdebatan mendasar tentang konsep keamanan, terkait perluasan agenda keamanan yang diperluas kepada isu-isu nonmiliter atau pandangan statis yang mempertahankan obyek referen keamanan, sedangkan pemikiran akan *broadening* dan *extending security* menurut Jones dimaksudkan untuk membedakan keduanya keluar dari perdebatan isu-isu nonmiliter dan obyek referen keamanan sebagai wacana perdebatan konsep keamanan selama ini (Jones, 1999:103-104).

Broadening security sebagaimana yang dijelaskan oleh Booth merupakan fungsi dari *deepening security*. Ketika orang berbicara mengenai keamanan, atau bertindak atas nama keamanan, maka segala kata dan tindakan mereka yang tertanam akan mencerminkan konsepsi yang mendalam secara natural mengenai politik dunia. Hal ini mengartikan bahwa isu keamanan hanya dapat diperluas berdasarkan asumsi-asumsi pokok teori politik (Booth, 2013:65).

Sedangkan *extending security* bagi Booth (2013:71) merupakan *restructuring security* yang berangkat dari keamanan negara (*state security*) sebagai obyek referen dalam perspektif realis, dan terutama *Copenhagen School*, maka teori keamanan kritis menjelaskan

obyek referen keamanan yang berbeda. Tugasnya adalah menolak siapa dan apa sebagai struktur kategorial yang memprevilasi teori politik (siapa yang dimaksud dalam hal ini adalah subyek keamanan dan apa mengacu kepada obyek keamanan). Berangkat dari ide, gagasan dasar maupun pemikiran utama pendekatan studi keamanan *Aberystwyth/Welsh School* terkait persoalan keamanan perbatasan. Maka melalui ketiga pernyataan ontologis karakteristik *Aberystwyth/Welsh School* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) *Deepening Security: What's real for border security*

Keamanan perbatasan mewakili bagian dari konseptualisasi keamanan yang menjawab kritik terhadap keamanan perbatasan ditinjau dari studi keamanan tradisional (ancaman militer-negara), namun juga merekonstruksi pemahaman analisis persoalan perbatasan berbasis orientasi konsep keamanan yang fokus terhadap persoalan-persoalan ancaman nirmiliter. Yang akan memperluas agenda keamanan perbatasan disamping kepada isu-isu nirmiliter, namun juga agar lebih dinamis atau tidak sekedar memandang persoalan keamanan perbatasan secara statis dengan pendekatan keamanan tradisional yang mewarisi pendekatan realisme maupun neo-realisme

2) *Broadening Security: What's knowledge of border security*

Isu-isu keamanan perbatasan, yang dipahami dalam konteks *deepening security* tidak hanya sekedar memuat politisasi sektor keamanan perbatasan saja. Namun juga meluas pemahamannya dikaitkan dengan fenomena politik dunia atas dasar asumsi-asumsi pokok teori politik

3) *Extending Border Security: What's to be done for border security*

Keamanan perbatasan tidak hanya didominasi sebagai bagian dari keamanan negara sebagai unit analisis maupun obyek referen keamanan, namun juga melibatkan obyek referen yang lain agar tidak terjebak pada previlase unit-unit analisis yang berkepentingan terhadap politik keamanan perbatasan yang dimaksud.

Dengan memahami ketiga pernyataan ontologis pendekatan studi keamanan kritis melalui *Aberystwyth/Wales School* ini, maka kuncinya terletak pada persoalan emansipasi keamananan perbatasan. Hal ini menjadi penting dikarenakan baik secara ancaman militer maupun nirmiliter, kesemuanya merefleksikan keamanan yang sebenarnya/nyata dari segala hal yang mengganggu eksistensi kehidupan lingkungan keamanan ekonomi, sosial, kesehatan, masyarakat, politik maupun individu sebagai obyek referensi keamanan perbatasan yang

nyata sekaligus bebas dari politisasi isu keamanan perbatasan yang cenderung *state-centrism* saja. Dan dalam hal ini menjadi penting ketika menempatkan faktor manusia/masyarakat/penduduk sebagai unit analisis yang kehidupannya terintegrasi dengan segala kehidupan keamanan lingkungan tersebut di atas.

Emansipasi menjadi konsep utama dalam pendekatan keamanan kritis. Dalam hal ini, Booth kembali menekankan pentingnya konsep emansipasi sebagai tujuan utama keamanan melalui pemikirannya yang tertuang dalam bukunya, yaitu *Theory of World Security* (2007). Menurut Booth, emansipasi adalah inti dari teori kritis keamanan dunia. Definisi konseptual dari Emansipasi yang dibangun oleh Booth berangkat dari pemahaman bahwa: sebagai wacana politik, emansipasi berusaha mengamankan manusia dari berbagai macam tekanan yang membatasi tindakan dalam kehidupan manusia, yang kompatibel dengan kebebasan pilihan-pilihan lainnya.

Jauh sebelum menjabarkan esensi konsep emansipasi dalam studi keamanan kritis melalui teori keamanan dunia tersebut, Booth sudah menjelaskan konsep emansipasi dalam studi keamanan ini dalam tulisannya yang berjudul *Security and Emancipation* (1991). Menurut Booth (1991:319) emansipasi adalah membebaskan manusia (dalam fungsinya sebagai individu maupun kelompok) dari berbagai ancaman yang meliputi tekanan fisik dan ikatan manusia terhadap segala bentuk paksaan/penindasan, yang mana emansipasi menghentikan kedua ancaman tersebut keluar dari yang seharusnya manusia dapat bebas menentukan apa yang ingin dilakukannya. Perang dan ancaman terhadap perang adalah salah satu dari ikatan keterancaman tersebut, bersama-sama dengan kemiskinan, pendidikan yang rendah, penindasan politik dan selanjutnya. Keamanan dan emansipasi adalah dua sisi yang berbeda dari koin yang sama. Emansipasi bukan kekuasaan atau sesuatu yang bersifat struktur/hirarki yang dihasilkan oleh keamanan. Emansipasi merupakan bentuk dari keamanan itu sendiri. Secara detail, definisi konsep emansipasi dalam studi keamanan *Aberystwyth/Welsh School* menurut Booth adalah:

“Security means the absence of threats. Emancipation is the freeing of people (as individuals and groups) from those physical and human constraint which stop them carrying out what they would freely choose to do. War and the threat of war is one of those constrains, together with the poverty, poor education, political oppression and so on. Security and

emancipation are two sides of the same coin. Emancipation, not power and order, produces true security. Emancipation, theoretically, is security.”

Seperti konsep-konsep lain dalam politik dunia, konsep emansipasi mengandung empat pengertian utama yang menekankan pada: pertama, arti kebebasan (*the meaning of freedom*); kedua, perbedaan antara emansipasi yang nyata dan palsu (*true and false emancipation*); ketiga, kebutuhan akan kemanusiaan yang ideal (*the invention of humanity needs ideals*); dan keempat, hubungan antara keamanan dan emansipasi (*relationship between security and emancipation*). Dalam hal ini, emansipasi sebagai bentuk dari keamanan itu sendiri merupakan perpaduan dari konsep keamanan dan emansipasi, dua sisi yang berbeda dari satu koin (*two sides of the same coin*) yang dinamakan penemuan kemanusiaan (*the invention of humanity*).

Pemikiran Booth melalui emansipasi sebenarnya didorong oleh kenyataan bahwa studi keamanan masih cenderung didominasi pemikiran mengenai keamanan negara (*state security*) yang masih berputar pada ancaman-ancaman bersifat militer (perang) yang menjadi domain dari analisis kaum (neo) realis. Negara sebagai unit sentral keamanan nasional menjadi penjamin utama keamanan bagi warga negara yang didasarkan pada persepsi ancaman militer (*state centric*). Bukan pada faktor keamanan manusia yang bebas dari segala bentuk ancaman dan penindasan nirmiliter.

Hal tersebut di atas tertuang dalam pemikirannya yang lain mengenai *security and self: Reflections of a Fallen Realist* (1997:107). Booth mengingatkan bahwa apa yang paling penting dari kecenderungan perang yang bersifat paksaan (kekerasan) akan menghambat emansipasi itu sendiri. Agar emansipasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka dalam kaitannya dengan mempelajari keamanan adalah tidak hanya fokus berkonsentrasi pada tujuan meminimalisir/mencegah perang saja. Menurunkan kemiskinan, tekanan politik dan lainnya juga merupakan faktor penting dalam hal ini. Selanjutnya, Tujuan dari keamanan kritis tidak bermaksud untuk mengurangi arti penting dari studi strategis dan keamanan militer, namun lebih dari perlu menambahkan pentingnya agenda keamanan yang lain, seperti kemiskinan, kebebasan manusia, kesehatan dan pendidikan.

Menurut Burchill dan Linklater (1996:224), Keamanan yang oleh Booth didefinisikan sebagai tidak adanya ancaman sangat berkaitan dengan emansipasi karena otonomi, dalam beberapa tahap tertentu, bergantung dari tidak adanya ancaman yang melumpuhkan.

Keamanan adalah yang melindungi atau menjaga otonomi. Tidak ada otonomi tanpa keamanan; karena tanpa keamanan individu atau kelompok tidak akan aman dalam pencarian mereka akan kebebasan, karenanya Booth dengan tegas menyatakan bahwa keamanan dan emansipasi seperti dua sisi dari koin yang sama. Kekerasan, perang, kemiskinan, tekanan politik dan pendidikan yang rendah hanyalah beberapa dari keterbatasan-keterbatasan yang disebutkan Booth, yang mengancam keberadaan individu dan kelompok, yang karenanya membahayakan kemampuan mereka untuk bertindak bebas. Keamanan berdampak menjauhkan ancaman terhadap kebebasan dan otonomi. Dengan pertimbangan inilah maka konsep emansipasi mutlak melibatkan keamanan.

Terkait pelibatan keamanan, maka konsep emansipasi yang memperkuat *broadening security* Booth menurut Albert dan Carlsson (2009:35) terkait dengan *absence of personal violence* dan *absence of structural violence*. Tujuan akhir konsep emansipasi keamanan adalah membebaskan manusia dari *personal violence* berupa *freedom from fear*. Di samping itu juga membebaskan manusia dari *structural violence* yang berwujud *freedom from want* dan *empowerment Dignity*.

Benang merah yang dapat ditarik dari pemikiran Booth, bahwa sebenarnya melalui penemuan kemanusiaan (*inventing of humanity*), maka keamanan dan emansipasi memberikan ruang kolaborasi keamanan tradisional (ancaman militer) dan non- tradisional (ancaman nir-militer). Ruang kolaborasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bertujuan untuk mencapai penemuan kemanusiaan. Penemuan kemanusiaan melalui membebaskan manusia tidak hanya berangkat dari ketiadaan perang (*the absence of war*) dan rasa takut akan akibat perang (*the absence of fear*), namun juga kebebasan manusia untuk menjalani keinginannya (*freedom from want*) di samping pemberdayaan manusia (*empowerment people*) di bawah payung keamanan manusia. Hal ini mengingatkan kembali kepada kecenderungan perang-perang baru dewasa ini yang banyak berorientasi pada perang sipil yang terjadi di dalam negara.

Kesimpulan

Pelajaran berharga yang dapat diambil dari relevansinya dengan keamanan perbatasan di Indonesia, baik dalam perspektif studi keamanan *Copenhagen School* maupun *Aberystwyth/Welsh School* nampak memberikan nuansa yang berbeda dalam menterjemahkan permasalahan keamanan perbatasan secara ontologis. Hal ini tidak dapat

dipisahkan dari hubungan timbal balik dari faktor internal dan eksternal melalui pendekatan teori yang dipakai khususnya dalam studi hubungan internasional. Oleh karena itu dalam konteks level analisis, unit analisis maupun aspek bangunan epistemologi dan aksiologi kedua perspektif studi keamanan tersebut di atas memiliki kekuatan dan keterbatasan masing-masing dalam memformulasikan kausalitas permasalahan keamanan perbatasan. Kunci permasalahannya tergantung dari letak geografis perbatasan yang relevan sebagai bagian dari wilayah yurisdiksi negara yang bersangkutan, dan yang paling penting tidak dapat dipisahkan dari faktor geostrategis negara-bangsa yang bersangkutan.

Dalam konteks keamanan perbatasan, maka posisi geostrategis negara-bangsa melalui letak geografisnya merupakan pusat kedaulatan wilayah negara yang bersangkutan yang menjadi konsep inti analisis ancaman keamanan, jika ditinjau dari perspektif studi keamanan *Copenhagen School*. Pengaruh pendekatan realisme dalam studi keamanan *Copenhagen School* dikaitkan dengan relevansinya terhadap keamanan kedaulatan wilayah yang menjadi tanggung jawab negara sebagai unit analisis utamanya. Ancaman keamanan dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya potensi ancaman *tangible factors* keamanan perbatasan yang meliputi kondisi fisik alam, jumlah penduduk/masyarakat, kekayaan alam. Berikutnya adalah potensi ancaman *intangible factors*, termasuk dinamika ideologi dalam wujud kepercayaan/agama atau etnis penduduk/masyarakat, seberapa besar pengaruh situasi dan kondisi politik lokal provinsi/kabupaten dimana perbatasan tersebut berada, kondisi ekonomi makro, kondisi sosial budaya dan pertahanan-keamanan perbatasan dari ancaman infiltrasi maupun eksfiltrasi dalam bentuk konvensional (militer) ataupun non konvensional (*transnational crime*).

Dengan demikian, dalam hal perspektif studi keamanan *Copenhagen School*, keamanan perbatasan di Indonesia sebenarnya juga merupakan pengejawantahan pergeseran isu-isu keamanan pasca perang dingin yang dipicu oleh dua faktor ancaman keamanan dalam bentuk *tangible factors* yang bersifat statis dan *intangible factors* yang cenderung bergerak dinamis. Keduanya mampu menghadirkan potensi ancaman keamanan yang bersifat militer maupun nirmiliter.

Namun berbeda dalam perspektif *Aberystwyth/Welsh School*. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dari deskripsi pembahasan sebelumnya, maka pengaruh pendekatan teori kritis terhadap isu-isu keamanan nontradisional atau lebih bersifat ancaman nirmiliter menjadi inti pokok dari analisis perspektif studi keamanan tersebut. Ancaman keamanan negara yang

dilahirkan dari potensi ancaman keamanan perbatasan sebagai obyek referen studi keamanan lebih ditempatkan sebagai subordinat obyek referen keamanan di bawah faktor manusia dalam hal ini. Jadi faktor manusia dalam level aktor negara dan non negara yang hidup dalam faktor-faktor *tangible*-statis maupun faktor-faktor *intangible*-dinamis bisa menjadi subyek ancaman keamanan maupun obyek ancaman keamanan di perbatasan itu sendiri.

Memahami keamanan perbatasan dalam hal ini dikembalikan kepada relevansi definisi konsep emansipasi Booth mengenai ontologi keamanan yang nyata (*truly security*). Dengan demikian pengertian hakekat ancaman keamanan negara menjadi kabur dikarenakan peran manusia sebagai aktor yang menjadi unit analisis keamanan bisa berperan sebagai subyek yang mengancam keamanan perbatasan maupun obyek yang terancam keamanannya karena hidup di lingkungan perbatasan tersebut dalam bentuk politik negara-bangsa. Pada intinya melalui pernyataan ontologis keamanan perbatasan yang mencakup *deepening*, *broadening*, dan *extending security*, maka konsep emansipasi yang menjadi inti pemikiran studi keamanan *Aberystwyth/Welsh School* menemukan wilayah keamanan yang sebenarnya/nyata secara epistemologi dan aksiologi melalui keberadaan *the absence of personal violence* dan *absence of structural violence*. Karena kedua *absence of true security* tersebut membebaskan ikatan kausalitas dikotomi ancaman keamanan militer dan nirmiliter sebagai tujuan akhir (*end of process*) keamanan perbatasan yang bebas dari belenggu politik keamanan negara (*state-centrism*) dari hegemoni pendekatan studi keamanan tradisional.

Sebagai penutup, penulis dalam hal ini menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LP2M UAI dalam memberikan bantuan dan dukungan material sepenuhnya, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan sesuai dengan batas akhir waktu yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Booth, Ken. 2007. *Theory of World Security*. New York: Cambridge University Press

Booth, Ken. 1997. "Security and Self: Reflections of a Fallen Realist". In Keith Krause and Michael C. Williams (eds). *Critical Security Studies: Concepts and Cases*. London: University College London

Booth, Ken. 2013. "Deepening, Broadening, Reconstructing". In Columba Peoples and Nick Vaughan-Williams (eds). *Critical Security Studies: Critical Concepts In Military, Strategic and Security Studies*. New York: Routledge. 57-85

Buzan, Barry, Ole Waever and Jaap De Wilde. (1998) . *Security: A New Framework For Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers

Burchill, Scott dan Andrew Linklater. 1996. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Terjemahan: M.Sobirin. Bandung: Nusa Media

Jones, Richard Wyn. 1999. *Security, Strategy and Critical Theory*. Colorado: Lynne Rienner Publishers

Wardoyo, Broto. 2015. *Perkembangan, Paradigma dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya Untuk Indonesia*. Klaten: Nugra Media

ARTIKEL/ESSAY DALAM JURNAL:

Booth, Ken. "Security and Emancipation". *Review of International Studies* 17:4 (1991): 313-216.

RUJUKAN ELEKTRONIK:

Alberth, Johan & Carlsson, Henning. 2009. "Critical Security Studies, Human Security and Peace". Melalui <www.iei.liu.se/stat/utbildning-grundniva/c-_och_d_uppsatser/juni2022009/1/120303/D-uppsatsJohanAlberthHenningCarlssonNY.pdf>[5 Mei 2014, 12:15]